**GROUP ASSIGNMENT**

**TOPIC. 5 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA**

**Kelompok 2:**

* **2602209160 Nadia Putri Septiani**
* **2602154123 Heru Deliansyah**
* **2602238021 Michael Geraldin Wijaya**
* **2602219975 Muhammad alib Dzakwan F. R.**
* **2602224760 Yohanes Richard Saputra P.**
* **2602206266 Zaky Satya Gumilang**

**TUGAS:**

Buatlah analisa singkat penanganan hukum atas penyelewengan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia!

**Penanganan Hukum Atas Penyelewengan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia**

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “krotos/certein” yang berarti pemerintahan. Dari pengertian mengenai demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan Yudikatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini digunakan oleh hamper seluruh angsa dan negara di dunia. Digunakan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, salah satunya negara Indonesia. berbeda dengan negara lain, Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dilandasi oleh nilai luhur Pancasila.

Demokrasi pancasila sebagai sistem politik di Indonesia menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Sistem ini menjadikan rakkyat dapat ikut berkontribusi dalam jalannya pemerintahan di Indonesia. Demokrasi Pancasila menjadim menjamin rakyat atas kesejahteraan kelangsungan hidup bernegara. Pemerintah wajib memenuhi hak warkyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Demokrasi harus berpedoman dalam nilai luhur pancasula hikmat dalam musyawarah sehingga dapat memehuni tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksaanaanya, demokrasi Pancasila tetntunya memiliki tantangan yang menimbulkan penyelewengan dalam implementasi di kehidupan bernegara. Adanya berbagai macam penyelewengan yang dapat timbul dalam masyarakat dan pemerintahan tentunya harus ditindak tegas secara hukum yang berlaku di Indonesia. Penindakan atas penyelewengan yang dilakukan harus ditangani dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Seluruh komponen negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama didepan hukum Indonesia. Penyelewengan atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia bukanlah suatu hal baru.

Penyelewengan demokrasi di Indonesia sering kali menggunakan kekuasaan penguasa untuk menyalahgunakan hukum di Indonesia. hal itu terjadi karena mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum nyatanya hanya permainan kuasa semata. Penyelewengan pelaksanaan demokrasi dilakukan oleh pihak yang tidak menghargai prinsip dasar demokrasi Pancasila, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak sipil dan politik lainnya.

Hukum yang dilaksanakan atas penyelewengan demokrasi Pancasila harus ditindak dengan tegas. Banyak sekali oknum kuasa yang mengatasnamakan kesejahteraan Bersama memonopoli demokrasi Pancasila Indonesia. hal ini dilakukan demi kepentingan penguasa atas demmokrasi di Indonesia. pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia tentunya jelas berkatian dengan para pemimpin. Implemestasi atas demokrasi digunakan pada saat pemilihan kepala kota, daerah, bahkan negara. Menurut Abraham Lincoln, mennyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini, diterapkan Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu.

Penyelewengan dalam pemilu bukanlah hal tabu didalam negara Indonesia. pemilu yang LUBER dan JURDIL merupakan hasil dari terciptanya demokrasi dalam Indonesia dengan kandungan nilai luhur Pancasila di dalamnya. Seringkali penyelewengan dilakukan dengan suap maupun kekerasan dapat dilakukan oleh komponen negara. Sudah semmestinya pelaksanaan hukum untuk menindak kasus penyelewengan demokrasi Pancasila dilaksanakan secara tegas. Dasar hukum Indonesia yang mengikat kuat seluruh tatanan negara berperan penting dalam menegakan keadilan demokrasi Pancasila.

Pers dan media massa merupakan sarana yang sangat mendukung terciptanya demokrasi dalam suatu negaraa. Pers dan media massa mempunyai tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait berita politik yang terjadi dalam negara sehingga masyarakat dapat menilai dan melakukan tindakan. Pers dan media massa di Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan generasi kritis untuk memerjuangkan hak atas kekuasaan tinggi pemerintahan Indonesia. Beberapa Lembaga hukum di Indonesia yang bertugas menangani kasus penyelewenggan pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain KPK, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga di Indonesia memiliki kewenangan untuk menindak tegas atas penyelewengan yang terjadi sesuai hukum yang berlaku.

Adapun beberapa contoh penyelewengan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sebagai berikut:

* Money politic
* Penggelembungan suara pemilu
* Rekrutmen politik yang tertutup
* Pengakuan HAM yang terbatas
* Pemilu yang jauh dari semangat politik
* Dominasi partai politik

Penegakan hukum atas penyelewengan demokrasi Pancasila diharapkan akan memperbaiki sistem politik yang ada di Indonesia. penegakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. negara perlu memperbaiki diri agar sistem demokrasi Pancasila berjalan dengan semestinya. Penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali dilakukan guna merusak demokrasi Pancasila sudah seharusnya dihentikan. Rakyat mempunyai hak untuk menuntut kuasa mereka untuk pelaksanaan negara yang dapat mensejahterakan rakyat. Sudah semestinya rakyat dan pemerintah Bersatu untuk menciptakan demokrasi Pancasila yang bersih tanpa campur tangan kotor para penguasa.